

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan awal dari lahirnya hubungan industrial antara pemilik modal dengan pekerja. Akhir-akhir ini banyak perusahaan yang memakai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) untuk menekan biaya buruh demi meningkatkan keuntungan. Hanya saja dalam prakteknya banyak penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga merugikan dan menghilangkan perlindungan terhadap pekerja/buruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan pekerja/buruh dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini disimpulkan, pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, jika dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, sudah terdapat perlindungan yang memadai terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai halangan yang disebabkan oleh ketidakjelasan aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sehingga terjadi penyimpangan terhadap penerapan pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) terhadap pemberian perlindungan pekerja/buruh diantaranya adalah, kendala yang berkaitan dengan peraturan, selain itu juga kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, dan terakhir adalah kendala pengawasan. Solusinya, untuk kendala yang berkaitan dengan peraturan yang kurang jelas, pemerintah sebaiknya segera melakukan perbaikan terhadap pengaturan pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan untuk kendala yang berkaitan dengan perjanjian kerja, demi meningkatkan perlindungan terhadap para pekerja/buruh pemerintah sebaiknya membuat format perjanjian kerja secara baku, dan untuk kendala yang berkaitan dengan pengawasan, sebaiknya setiap pegawai pengawas diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi pada pekerja/buruh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga fungsi pengawasan dapat memberikan efek jera terhadap para pengusaha yang melakukan pelanggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja/Buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

ABSTRACT

Work agreements are the beginning of the birth of industrial relations between capital owners and workers. Lately, many companies have used the Certain Time Work Agreement (PKWT) to reduce labour costs in order to increase profits. But in its implementation, there are many applications for the system of Specific Time Work Agreements (PKWT) that are not in accordance with the provisions of Law Number 13 of 2003 on Labourers, so that they harm and eliminate protection for workers / labourers. This study aims to find out about the protection of workers / labourers in a Certain Time Work Agreement (PKWT) since the enactment of Law Number 13 of 2003 concerning Labour. This research is descriptive analytical with a normative juridical approach, while data is obtained through library research and field research. Then the data is analyzed qualitatively. The results of this study concluded, the implementation of protection of workers / labour at a certain time agreement, if carried out in accordance with existing regulations, there is adequate protection for workers / laborers of certain time employment agreements, except that there are still various obstacles caused by obscurity in the implementation. the rules regarding the implementation of a Certain Time Work Agreement, so that there is a deviation towards the implementation of protection for workers / laborers for a Certain Time Work Agreement. The constraints faced in the implementation of a certain time work agreement (PKWT) on the provision of workers / labourers protection include the constraints related to regulations, work agreements, and finally the constraints of supervision. As for the solutions, regarding to the constraints of unclear regulations, the government should immediately make improvements towards the arrangements for workers / labourers of the Specific Time Work Agreement (PKWT), and for the constraints that related to work agreements, in order to improve protection of government workers / labourers, there should be the making of work agreement form by default, and for the constraints related to supervision, it is recommended that each supervisory staff has to be given the authority to take direct action against violations that occur to workers / labourers of Specific Time Work Agreements (PKWT) carried out by the company, so that the supervisory function can provide deterrent effect on entrepreneurs who commit violations.

Keywords: *Legal Protection, Worker/Labour, Certain Time Work Agreement.*